

# KRISIS IKLIM, GENDER, DAN KERENTANAN: POTRET PEREMPUAN PETANI DI KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH

Muhammad Salman Al-Farisi  
Email : [contact.msalfarisi@gmail.com](mailto:contact.msalfarisi@gmail.com)

Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., MPP.  
Email : [alfirdaus\\_laila@yahoo.com](mailto:alfirdaus_laila@yahoo.com)

Departemen Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## Abstract

*Learning from the experiences of women farmers in Kaliboto Village, Mojogedang, Karanganyar Regency, this paper disusses the gender dimensions of climate crisis which causes vulnerabilities, including to women farmers. Despite the previous numerous studies about climate crisis in Indonesia, it is unfortune to see that climate issues are centralized on technical paradigm instead of being seen as a political problem in general. Hence, this study focuses on how gendered-vulnerability happen and can be explained through power relations which politically exist among women farmers. To answer those questions, the researcher uses a qualitative method through interviews, literature and documentation analysis, and academic discussion. This research found that women farmer's vulnerability is a real problem which exists in the society. Women farmers are often weak and weakend in terms of adaptation capability in any level of society, including limited access to some resources that have worsen their capability to strengthen resilience. The vulnerbalities that have been found regarding the impact of climate crisis are the needs of water for crops and households, labor absorption and revenue-stream, limitation of knowledges, roles, and public participation for women farmers in climate crisis era*

*Keywords: Climate Crisis, Gender, Women Farmer's Vulnerability*

## **Abstrak**

Belajar dari pengalaman perempuan petani di Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti dimensi gender pada krisis iklim yang menimbulkan banyak kerentanan termasuk di dalamnya perempuan petani. Dibalik kajian yang meneliti dampak krisis iklim Indonesia, sangat disayangkan problematika iklim yang terjadi seringkali dipusatkan hanya pada paradigma teknis dan jarang dilihat duduk sebagai persoalan politik secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana kerentanan gender terjadi dan dapat dijelaskan melalui adanya relasi kuasa pada perempuan petani yang begitu terasa dampaknya secara politis. Untuk menganalisis hal ini, peneliti kemudian menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik wawancara, analisis studi dokumentasi dan literatur, serta diskusi akademis. Berdasarkan studi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa kerentanan hadir secara nyata dalam tatanan sosial masyarakat, khususnya bagi perempuan petani yang seringkali lemah dan terlemahkan kemampuan adaptasinya serta tidak memunyai akses terhadap sumber daya baik material maupun non material dimana hal tersebut tidak lain merujuk pada buruknya tingkat ketangguhan mereka. Bentuk kerentanan yang ditemukan diantaranya pada berbagai implikasi-implikasi terhadap kebutuhan air bagi pertanian dan rumah tangga perempuan petani, menurunnya penyerapan tenaga kerja dan penghasilan, dinamika terbatasnya pengetahuan, peran, dan partisipasi publik perempuan petani di era krisis iklim.

*Kata Kunci: Krisis Iklim , Gender, Kerentanan Perempuan Petani*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti dampak krisis iklim terhadap kerentanan gender termasuk di dalamnya perempuan petani. Krisis iklim menjadi ancaman nyata yang dihadapi warga global dimulai sejak peradaban industri/modern dan menjadi ancaman yang tidak bisa dihindari. Namun, sangat disayangkan problematika iklim yang terjadi seringkali dipusatkan hanya pada paradigma teknis, walau sejatinya krisis iklim lebih dari sekadar suhu dan curah hujan. Dampak negatif dari krisis iklim begitu terasa secara politis dalam tatanan sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok yang dianggap lemah kemampuan adaptasinya dan tidak memunyai akses terhadap sumber daya tertentu dimana tidak lain merujuk pada isu kerentanan (Udas, & Larrington-Spencer, 2019; Kaijser & Kronsell, 2014; Tompkins & Adger, 2004).

Terlebih pada diskursus ini, kehadiran krisis iklim di tengah masyarakat dilihat dengan tendensi yang bias. Dengan kata lain adaptasi krisis iklim tidak benar-benar berdiri secara netral —melainkan menghasilkan perbedaan dan ketidakadilan antara satu dengan yang lainnya, secara khusus kaum laki-laki dan perempuan —dalam hal ini yang dirasakan oleh perempuan secara spesifik perempuan petani —demikian inilah tidak dapat digali dengan hanya melihat sudut paradigma teknis. (Call &

Sellers, 2019; Denton, 2002; Houria Djoudi et al., 2016; Goodrich).

*Green House Gases (GHGs)* dan *Carbon Cycle* sebagai penyebab utama terganggunya keseimbangan komposisi energi di atmosfer —yang mengakibatkan krisis iklim —dengan berubahnya tantangan dan ketidakpastian iklim. Sebagai contoh, pola hujan dan panas yang tidak teratur seperti pada wilayah pertanian (UNDP, 2009). Hal ini diperburuk dengan kondisi negara-negara belahan dunia selatan (*emerging countries*) yang rata-rata masih mengandalkan kehidupannya pada alam dan/atau hasil alam atau pertanian dimana dari dimensi sosial termasuk di Indonesia —krisis iklim akan sungguh menentukan hasil produktivitas dan alternatif penghidupan lainnya untuk keberlanjutan pertanian dan petani itu sendiri (Hall & Weiss, 2013).

Namun, konsekuensi mengenai iklim hanya berbicara sebatas produktivitas lahan saja, apakah demikian? Seperti diskusi pada awal paragraf tulisan ini, paradigma teknis sudah tidak dapat menjadi acuan tunggal dalam melihat sebuah fenomena yaitu krisis iklim. Terjadinya fenomena krisis iklim terlalu kompleks untuk disimplifikasi sebagai masalah lingkungan saja, tetapi masalah ini juga menjadi terlalu sederhana jika hanya diteropong melalui paradigma teknis.

Sebagai contoh, jika diruntut kembali

pada pokok bahasan produktivitas lahan diatas, hal tersebut bukan satu-satunya akibat yang ditimbulkan dari krisis iklim melainkan subjek atau aktor atasnya, apakah kemampuan adaptasi fenomena tersebut hadir secara tepat atau tidak —oleh karena itu petani pantas untuk disorot. Nyatanya, petani perempuan dan laki-laki yang tidak jarang menjadi satu keluarga memiliki hubungan gender satu sama lain.

Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Menilik buah paradigma politik, pada tingkatan mikro, hubungan gender antar subjek dan aktor dalam pertanian tidak lah terjadi begitu saja, hubungan-hubungan aktivitas dan praktik-praktik empirik yang terjadi berulang kali dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat petani hingga pada akhirnya saling memengaruhi posisi atau peran antara perempuan petani dan laki-laki. Hal tersebut akan ditentukan dengan pola relasi (termasuk jenis relasi kuasa), budaya, dan struktur masyarakat hingga diperoleh keluaran siapa yang lebih rentan dan dirugikan atas terjadinya fenomena krisis iklim (Arora-Jonsson, 2011; Avelino & Rotmans, 2009).

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk turut melengkapi perkembangan penelitian-penelitian yang telah ada pada aspek sosial-politik dalam melihat dampak fenomena krisis iklim, terlebih untuk menggali potret atau pengalaman perempuan petani yang selam ini turut menjadi bagian terdampak krisis iklim di

Indonesia. Dalam menggali fenomena yang ada, penelitian ini menggunakan analisis interseksional sebagai pendekatan untuk mengetahui perbedaan gender yang terjadi secara lebih baik yang akan diperjelas pada paragraf lain (Call & Sellers, 2019; Denton, 2002; H. Djoudi & Brockhaus, 2011; Houria Djoudi et al., 2016; Eastin, 2018; Kaijser & Kronsell, 2014; Tompkins & Adger, 2004).

## METODOLOGI

Metodologi penelitian pada dasarnya menjelaskan bagaimana membuat argumen-argumen yang berlandaskan dengan kaidah-kaidah ilmiah melalui pengaplikasian *skills of reasoning* yang dilakukan sehari-hari kepada pertanyaan yang lebih besar dalam melihat dan mempertajam fenomena sosial-politik lalu hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. (Halperin & Heath, 2012: 2; Herdiansyah, 2010)

Dalam konteks penelitian ‘Krisis Iklim, Gender, dan Kerentanan: Potret Perempuan Petani di Karanganyar, Jawa Tengah’ metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. Melalui jenis penelitian kualitatif, bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2007:4).

Untuk itu penelitian ini diperkuat dengan pengambilan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara terhadap *key informant* (termasuk wawancara terhadap *stakeholders*) serta masyarakat petani (perempuan dan laki-laki

petani) yang telah diseleksi secara representatif. Selain itu dilakukan pula studi pustaka/literatur dan studi dokumen pendukung terkait dengan konteks penelitian terutama pada aspek fisik krisis iklim dan pertanian, teori gender, studi kerentanan dan kebencanaan, sosiologi, dan feminisme yang mendukung penelitian.

Dengan demikian penelitian ini memberikan pengertian mendalam mengenai fenomena krisis iklim yang memberi dampak pada kerentanan gender bagi perempuan petani di Karanganyar, Jawa Tengah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerentanan Perempuan Petani Di Kabupaten Karanganyar

Sebelum membawa diskusi ini lebih dalam, adapun digunakannya terminologi krisis iklim didasari dengan bergesernya terminologi perubahan iklim menjadi ‘krisis iklim’ untuk menekankan keadaan iklim global yang sedang darurat/krisis dibandingkan terminologi ‘perubahan iklim’ yang dirasa terlalu lembut dan kurang berbunyi sebagai ancaman yang memusnahkan dan/atau merugikan, hal ini dilansir oleh situs jurnalistik independen *The Guardian*<sup>1</sup>, diperkuat dengan tulisan (Spratt, Dunlop, By, & Joachim, n.d., 2019) berjudul *What Lies Beneath* yang menyematkan terminologi ‘*Climate Crisis*’ oleh ilmuwan iklim Prof. Hans Joachim Schellnhuber tersebut.

Walaupun istilah krisis iklim tidak digunakan dalam banyak referensi pada penelitian ini, bagaimanapun senada dengan terminologi perubahan iklim, keduanya tetap mengacu pada setiap perubahan keadaan iklim global yang menjadi genting, baik diakibatkan oleh perubahan-perubahan alam itu sendiri maupun hasil dari aktivitas manusia, dimana secara fisik, aktivitas manusia memberikan sumbangsih terbesar dengan hadirnya fenomena *greenhouse gases effect*.

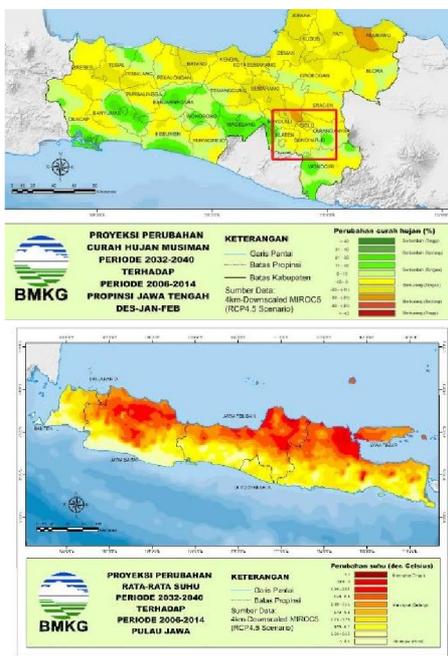
Di Kabupaten Karanganyar, dampak krisis iklim ini dilihat sebagai hal yang ‘samar-samar’, namun merujuk pada profil kerentanan iklim Kabupaten dan *trend* kebencanaan di daerah ini Karanganyar setidaknya menduduki kawasan yang patut dilihat sebagai wilayah terdampak. Jika dilihat dari tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (JER 1) Kabupaten Karanganyar hanya memiliki sekitar 11% kelas tinggi, hal ini diperparah dengan sementara itu bencana dari tahun 2012 sampai 2017 *trend*-nya semakin naik berdasarkan laporan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023.

Berdasarkan informasi yang diambil dari BMKG Stasiun Klimatologis Semarang yang bekerjasama dengan Stasiun Klimatologi PUSLITBANG FP-UNS Jumantono (diluar BMKG), di Kabupaten

---

<sup>1</sup><https://www.theguardian.com/environment/2019/may/17/why-the-guardian-is-changing-the-language-it-uses-about-the->

Karanganyar suhu rata-rata mengalami trend kenaikan 0.017% pertahun (lihat gambar 3.10) dan terdapat kenaikan trend curah hujan 0.03% pertahun. Sedangkan pada tahun 2019 menurut data BPS (2020) setidaknya terdapat penurunan curah hujan mulai dari awal tahun sampai akhir tahun perbulannya (lihat gambar 1.1)



Gambar 1.1 Simulasi Model Iklim Regional Periode (2006-2014) terhadap Periode (2032-2040) Oleh BMKG

Sebanding dengan struktur ekonomi yang mengantungkan pertanian sebagai sektor penyumbang pendapatan terbesar kedua. Praktis termasuk di dalamnya banyak rumah tangga petani dan perempuan profesi petani yang —tidak hanya terdampak secara fisik oleh krisis iklim namun juga situasi sosial serta pilihan-pilihan kebijakan dalam

merespon krisis iklim.

Namun, fakta dilapangan menunjukkan responsivitas kebijakan daerah terhadap iklim dan gender, peneliti hanya mengacu dokumen perencanaan saja. Dalam konteks perencanaan pembangunan iklim dan gender, keduanya merujuk pada satu dokumen yang sama yaitu RAN-API.

Dari potret panjang kondisi yang ada di Kabupaten Karanganyar maka peneliti menarik beberapa kelompok masyarakat yang teridentifikasi lebih rentan dibanding dengan kelompok masyarakat lainnya. Variabel yang menyebabkan lebih rentan diantaranya adalah sektor ekonomi (Proporsi demografi, keadaan geografis (keterpaparan terhadap bencana), kemiskinan, pendapatan rendah, akses layanan publik, dan partisipasi politik), dengan sedikit modifikasi model yang diambil dari RAN-API Kota Kupang (UNDP, 2015)<sup>2</sup>.

Kelompok-kelompok yang terdampak antara lain adalah kelompok yang berpotensi termarjinalkan karena adanya kemampuan dan kapasitas adaptasi yang rendah diantara yang lain. Kemampuan ini tidak diimbangi pula dengan bentuk-bentuk pembangunan datau dorongan kebijakan yang cukup dalam menguatkan kapasitas kelompok-kelompok ini. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya: kelompok petani, kelompok perempuan dan janda,

<sup>2</sup> [http://www.kotakita.org/publications-](http://www.kotakita.org/publications-docs/UCRMP_Kupang_21082015_Bahasa.pdf)

[docs/UCRMP\\_Kupang\\_21082015\\_Bahasa.pdf](http://www.kotakita.org/publications-docs/UCRMP_Kupang_21082015_Bahasa.pdf)

kelompok anak-anak dan disabilitas, dan kelompok pekerja informal. Kelompok petani dan perempuan sesuai dengan konteks penelitian, peneliti pisahkan menjadi kelompok tersendiri. Pada dasarnya perempuan/janda tidak terlalu berbeda dengan perempuan petani, namun peneliti menilai urgensi perempuan petani dapat dipisahkan dari kelompok perempuan lain.

Kelompok perempuan pada krisis iklim sering kali kurang strategis posisinya dibandingkan laki-laki (karena struktur masyarakat yang banyak memlimitasi akses perempuan terutama secara legal) terutama jika memiliki pekerjaan sama seperti perempuan petani, kegiatan domestik dan produktif harus dijalankan secara bersamaan, terlebih jika janda mengalami kesulitan perekonomian maka kesejahteraannya akan berkurang.

Menariknya, setelah diidentifikasi terpisah hasilnya indikasi kerentanan yang dimiliki oleh perempuan petani dinilai cukup signifikan terhadap fenomena iklim yang ada di Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan kelompok lainnya. Perempuan petani rentan dan terdampak baik pada aspek geografis, sosial, ekonomi, dan politik

Area dengan sektor pertanian sebagai penyumbang pendapatan terbesar kedua di Kabupaten Karanganyar, beserta jumlah petani yang cukup banyak yaitu terdiri atas

104.739 rumah tangga petani produktif dari 886.519 total penduduk. Tentu saat di tengah krisis iklim, cuaca yang tidak bisa terprediksi terutama dengan ancaman puso serta kekeringan mengancam kehidupan petani dan/atau perempuan petani. Hal ini termasuk bagi lebih dari 44.000 perempuan petani yang juga masuk dalam keterpaparan krisis iklim.

Dengan jumlah yang cukup banyak, maka bila ketahanan (Kemampuan adaptasi serta mitigasi) perempuan petani tidak cukup mumpuni, maka sudah bisa dipastikan kerentanan perempuan akan semakin buruk saja. Sementara itu, kelompok masyarakat lainnya, yang teridentifikasi juga ikut menjadi bagian kelompok rentan terhadap krisis iklim di Kabupaten Karanganyar adalah anak-anak. Peneliti melihat anak-anak dalam konteks perempuan petani tidaklah berdiri sendiri, melainkan kaitannya juga kerentanan perempuan petani, dimana dalam hal ini mayoritas dari perempuan petani adalah seorang ibu. Ketika anak-anak dengan tingkat kurangnya perlindungan dan pengawasan dari orang tua (biasanya ibu-nya) mengalami kerentanan yang cukup rentan akibat krisis iklim seperti jika terjadi bencana atau ketidakstabilan ekonomi bagi perempuan petani, maka praktis peran domestiknya akan semakin bertambah.

Di Kabupaten Karanganyar sendiri signifikansi antara kerentanan perempuan

dengan kelompok rentan lainnya (anak-anak) semakin di dukung dengan besarnya proporsi penduduk di bawah usia produktif di Kabupaten Karanganyar termasuk usia sekolah dan pra sekolah. Hal ini dimaknai sebagai makin tingginya kerentanan bagi perempuan petani dengan kondisi ekonomi rendah dan fluktuatif bahkan cenderung menurun seiring dengan anjloknya produktivitas lahan akibat krisis iklim.

Sementara kerentan perempuan petani di Kabupaten Karanganyar ditilik dari persilangan kelompok rentan lainnya juga dapat dilihat pada profesi/pekerjaan pada sektor informal. Perempuan petani di Kabupaten Karanganyar khususnya pada desa studi kasus, tidak dapat dilepaskan dari *side job* yang dimiliki oleh setiap individu petani dan/atau perempuan petani. Hampir semua perempuan petani memiliki alternatif pekerjaan selain bertani, walau memang cakupannya sangat terbatas. Menurut UNDP (2015) pekerja informal merupakan masyarakat dengan *skill* terbatas akan mengambil peran-peran di sektor yang kurang menguntungkan seperti pedagang informal di pasar-pasar tradisional, buruh angkut, kuli bangunan, sopir ojek, sopir angkot, pemulung ataupun sektor informal lainnya. Bagaimanapun dengan keterbatasan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, sektor yang disasar oleh petani dan/atau

perempuan petani tidak lain akan terbatas pada sektor informal. Petani perempuan bahkan lebih tidak menguntungkan lagi, dengan benturan norma dan stigma sosial yang memberikan keterbatasan perempuan untuk memperoleh pendapatan diluar pendapatan suami. Sehingga alternatif yang dilakukan biasaya hanya menjadi buruh dan pekerja harian yang tidak terikat kontrak maupun pendapatan tetap di tengah krisis iklim.

### **Pembangunan Dan Kerentanan Gender Perempuan Petani Di Kabupaten Karanganyar Sebagai Dampak Krisis Iklim**

Kategori perempuan petani dan/atau perempuan secara umum merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mempunyai kerentanan lebih dibandingkan dengan kelompok lainnya. Pembangunan gender memiliki tarikan yang cukup signifikan dengan bagaimana proses pembangunan responsif bagi semua gender baik pemenuhan kebutuhan laki-laki maupun perempuan, sehingga marginalisasi kelompok tertentu dapat ditekan. Dengan melihat basis dokumen perencanaan (RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023), di Kabupaten Karanganyar target pemberdayaan gender dan pembangunan gender belum menysasar persoalan perempuan petani sebagai subjek pemberdayaan akibat krisis/perubahan iklim.

Persoalan gender di tengah-tengah kelompok perempuan petani tidak secara spesifik ada dalam dokumen pelaksanaan maupun rencana kerja dinas terkait yaitu *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar (DP3APPKB) (DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, 2020)*. *Sementara itu, jelas tertulis bahwa perencanaan pembangunan gender di Karanganyar menekankan pada penguatan pembangunan gender dengan mengedepankan peningkatan pendapatan perempuan rentan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan serta peningkatan kemampuan perempuan diberbagai sektor. Sebagai tambahan, peneliti juga menemukan bahwa kerentanan di wilayah Kabupaten Karanganyar tercermin dari bagaimana dimensi dan variabel gender belum disebut sebagai sebuah indeks penilai kerentanan perubahan iklim pada SIDIK KLHK (lihat gambar 1.2). Sehingga tidak mengherankan sejalan dengan fakta lapangan, perempuan petani belum tersentuh secara spesifik dan tidak langsung sebagai kelompok rentan.*

Bagaimanapun, keberadaan indeks pembangunan dan pemberdayaan gender merupakan sebuah awal untuk menakar hadirnya persoalan gender di Indonesia. Terlebih hal ini juga menjadi titik berangkat

(*focal point*) atas keberadaan isu gender secara makro di tengah masyarakat terutama bagi memudahkan kebijakan PUG oleh Pemda—sehingga perlu dipertahankan.

Komisi Perempuan Indonesia memandang, keberadaan IPG dan IDG bila dikupas secara kontekstual belum sampai membedah masalah yang tidak terlihat baru pada tataran teknis, termasuk di dalamnya kelompok perempuan petani. Absennya peranan perempuan petani dalam pembangunan serta pemberdayaan pada sektornya sendiri dimaknai sebagai akibat tergesernya peran sosialnya yang lagi-lagi masih dilihat sebagai kelompok kelas dua di beberapa wilayah. Walau demikian temuan di lapangan menunjukkan variabilitas respon yang berbeda-beda dengan tingkatan kerentanan yang berbeda pula tergantung pada perkembangan norma dan kondisi sosial keluarga (kapasitas sosial dan finansial) (Carr, 2008; Carr & Thompson, 2014).

Pada dasarnya relasi gender dan pembangunannya merupakan persoalan bagaimana kebutuhan antar kelompok masyarakat dapat terpenuhi. Temuan peneliti dalam melihat relasi gender pada perempuan petani secara makro menunjukkan kecenderungan yang masih sama dengan kebanyakan struktur masyarakat yang ada di Indonesia yaitu berkenaan akses dan kontrol perempuan petani terhadap sumber daya

tertentu dimana telah terlebih dahulu berkembang ditengah masyarakat (lihat gambar 1.2). Hal ini yang menjadi basis adanya kerentanan utama bagi perempuan petani yang dapat menimbulkan berbagai kerugian sosial berbasis gender, utamanya bila bertemu aspek interseksi lainnya seperti sosial-ekonomi, sosial-politik, dan geografis akibat krisis iklim (Eastin, 2018; Goodrich, Udas, & Larrington-Spencer, 2019; MacGregor, 2010).

Pada diskusi ini, peneliti hendak mengawali dengan memaparkan kondisi pembangunan gender yang terlebih dahulu berhubungan dengan identifikasi kerentanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat di Kabupaten Karanganyar —seperti yang telah didiskusikan pada pembahasan sebelumnya. Salah satu data penelitian dari akademisi Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) mengulas bahwa keberadaan kerentanan gender dimaknai dengan kaitan lima indikator besar kerentanan yaitu jika dampak krisis iklim bertemu dengan kapasitas fisik, material, finansial, sumber daya manusia, dan sosial. Dalam pemenuhan kapasitas di atas, salah satu instrumen yang peneliti soroti adalah bagaimana hubungan peningkatan kapasitas perempuan petani dan krisis iklim hadir dalam pembangunan. Salah satunya dipandang dari indeks gender —sebagai instrumen dalam pembangunan.

Indeks gender memang tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Karena hal tersebut berkaitan dengan tingkat keadilan tidak hanya pada *level* permukaan, namun juga keadilan bagi semua penduduk tanpa terkecuali. Indeks Gender di Indonesia kerap dihitung melalui metode perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG adalah Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan, IDG digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan (Kemenpppa, 2019).

Data yang diperoleh dari Baperlitbang (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 yang mengukur kinerja tahunan pembangunan Kabupaten. Target IPG tercatat sebesar 97.00 dengan realisasi pada tahun 2019 hanya sebesar 91.47 (94.3%). Sementara itu target IDG mengalami surplus pencapaian dengan target sebesar

74.52 pada tahun 2019 mencapai 80.51 (108.04%). Walaupun demikian, capaian IPG dan IDG secara umum masih di atas wilayah lain, sebagai catatan untuk IPG Kabupaten Karanganyar diketahui menurun dari 96.61 menjadi 91.47 (Kemenpppa, 2019). Termasuk pada dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023, tertulis bahwa masih ditemukan kesenjangan pembangunan responsif gender (diketahui dari nilai IPG tahun 2017 sebesar 69,68 lebih rendah dari nilai relatif IPG Provinsi Jawa Tengah)

### **Signifikansi Gender, Kerentanan Perempuan, dan Krisis Iklim**

Setelah mengetahui bagaimana kontekstualisme gender dan kerentanan perempuan petani akibat dampak krisis iklim di desa studi kasus dan analisis gender pada usaha-usaha terkait dengan krisis iklim di Kabupaten Karanganyar— dapat ditarik satu signifikansi kuat untuk menghubungkan analisis gender, kerentanan, dan pengalaman dampak krisis iklim bagi perempuan pertanian. Terlebih sebelumnya telah ditunjukkan, bagaimana pembangunan gender memegang peranan penting di Kabupaten Karanganyar sebagai potensi meningkatkan ketahanan perempuan petani. Sebagai pengingat kembali bahwa relasi gender juga merupakan bagaimana potret kondisi sosial dimana masyarakat yang dianggap kurang tangguh untuk beradaptasi mengalami

kerugian lebih besar dibanding dengan kelompok masyarakat lainnya (Denton, 2002; Partey et al., 2020; Rochmayanto & Kurniasih, 2013).

Di Kabupaten Karanganyar, seperti pada diskusi sebelumnya peneliti belum mendapatkan data dokumen yang menyatakan adanya kerentanan berbasis gender akibat krisis/perubahan iklim. Namun, data IDG dan IPG (Indeks gender) sedikit dapat menunjukkan tingkat kemampuan adaptasi berbasis gender di Kabupaten Karanganyar. IPG dari Kabupaten Karanganyar terlihat menurun dari tahun sebelumnya sebesar 96.61 menjadi 91.47 (Kemenpppa, 2019).

Bentuk IPG yang menurun menjadi sebuah konsekuensi dan pekerjaan bagi pembangunan gender berbasis adaptasi iklim bagi Kabupaten Karanganyar—hal ini penting karena menunjukkan adanya potensi kerentanan cukup signifikan bila pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan tidak seimbang atau memperhatikan ketimpangan gender, maka dapat dipastikan bahwa ketangguhan akan bencana pada lingkup krisis iklim akan semakin menambah berat beban perempuan-perempuan (perempuan petani dan buruh petani khususnya) di Kabupaten Karanganyar untuk bertahan di tengah kondisi tersebut. Terlebih kemampuan perempuan yang mempunyai beban ganda

sebagai pekerja domestik di rumah, semakin memberi angka minus ketangguhan bencana iklim bagi perempuan di Kabupaten Karanganyar.

Dengan demikian fakta bahwa perempuan tidak dibayar untuk melakukan dua pekerjaan akan mempengaruhi kualitas kesejahteraan mereka secara tidak langsung, namun seperti halnya temuan pada sub bab sebelumnya, pengaruh maskulinitas pada bidang pertanian menyebabkan perempuan petani yang tinggal di desa studi kasus tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Karena sudah dianggap hal yang biasa dan sesuai norma yang berlaku (dimana menjadi salah satu bentuk bagaimana sistem relasi kuasa bekerja yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya).

Sebagai contoh melihat data pekerja Kabupaten Karanganyar terlihat potensi *unpaid worker* para perempuan petani/buruh tani sejalan dengan temuan bahwa perempuan petani memang bekerja untuk pertanian keluarga harus berpikir dan bekerja lebih ekstra untuk menghemat modal atau pengeluaran dalam sekali masa tanam hingga panen. Sehingga ketika mereka menjalankan pekerjaan di lahan pertanian dengan pekerjaan domestik —ditambah dengan adanya krisis iklim maka kompleksitas beban perempuan semakin nyata dirasakan. Terlebih, perempuan tidak mempunyai banyak hal yang

ditawarkan sebagai akibat lemahnya posisi tawar mereka bersama dengan adanya faktor kerentanan gender akibat krisis iklim. Hal ini dikuatkan dengan keterangan objek penelitian (objek 5) pada temuan desa studi kasus yaitu perempuan petani bernama Sri di Desa Kaliboto yang mengutarakan kegiatan pemberdayaan petani cenderung diberikan oleh laki-laki petani (maskulinitas).

Senada dengan hal di atas, semua objek penelitian yaitu perempuan petani belum pernah melakukan proses pemberdayaan berbasis peningkatan pendapatan di dalam sektor pertanian maupun di luar sektor pertanian —adapun tingkatan pemberdayaan perempuan petani hanya melalui saluran PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) —dimana kegiatan PKK tersebut jarang dilakukan secara intensif untuk kebutuhan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga petani (PKK pada desa studi kasus hanya berfokus pada penyuluhan kesehatan tiap bulannya dan pembuatan hasta karya (*recycling*) serta penampilan demo memasak). Tidak benar-benar memberdayakan bagaimana menumbuhkan kesadaran kritis. Sedangkan, hal ini yang sering kali menjadi ‘pekerjaan rumah’ sesungguhnya bagi perempuan petani. Pengetahuan pertanian perempuan yang sejak dahulu kala hadir lambat laun tergeser dengan peran-peran teknologi, bahkan dalam diskusi sebelumnya

untuk mengetahui bagaimana membaca iklim yang benar, salah satunya dapat dilakukan dengan proses Sekolah Lapang Iklim (SLI) milik BMKG, namun keberadaannya sama saja, tidak dinikmati manfaatnya oleh mayoritas perempuan petani di desa studi kasus. Hal yang sangat mungkin terjadi di daerah lain yang serupa. Sehingga segala solusi dan penanganan dunia pertanian terkonsentrasi pada laki-laki petani (Ylipaa, Gabrielsson, & Jerneck, 2019).

Kontaradiktif dengan desa studi kasus penelitian —sangat menunjukkan contoh adanya pelemahan secara sistem dan hambatan norma —dimana posisi perempuan petani dikonstruksi sebagai kelompok nomor dua di bidang pertanian. Namun, pada faktanya di luar desa studi kasus maupun objek yang diwawancarai, terdapat cukup contoh praktik-praktik lokal perempuan petani yang berperan aktif memberikan kontribusi ide, gagasan, tenaga, dan peran sosial. Sehingga beban ganda, timpangnya kualitas kesejahteraan, dan ketidak ketangguhan sosial perempuan petani dapat perlahan berkurang secara signifikan.

Pada salah satu kesempatan diskusi *online* peneliti melihat gagasan perempuan petani pembenih asal Wonogiri bernama Surati, hanya berpendidikan sekolah dasar.

Surati mendapatkan akses pengetahuan dan pemberdayaan dari salah satu LSM Yayasan Gita Pertiwi hingga mampu menjadi pemulia bibit dengan melakukan riset sederhana dan berbekal pelatihan dari Filipina, ia mampu menghasilkan bibit yang cocok secara lokal dan unggul bernama Rati Rata Hayu.

Dalam mengambil dan mengamati sosok Surati, peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung melainkan ikut pada salah satu kesempatan diskusi virtual yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) pada Rabu 1 Juli 2020.<sup>3</sup> Selain itu peneliti melakukan penelusuran jejak digital yang dapat ditemukan pada kanal Youtube, dimana terdapat video wawancara dan profil Surati.<sup>4</sup> Aspek gender yang dapat dilihat dari sosok Surati, ia merupakan seorang yang memiliki akses modal dan pengetahuan dengan memiliki aset berupa alat pemilah gabah dan beras. Selain itu, sebagai perempuan petani Surati menikah pada usia yang cukup muda yaitu 18 tahun dengan pendidikan tamatan

---

<sup>3</sup> Hak Paten Atas Benih dukung Kemandirian Petani, <https://mediaindonesia.com/read/detail/324608-hak-paten-atas-benih-dukung-kemandirian-petani.html>

<sup>4</sup> Ibu Surati - Kartini Petani Dari Wonogiri <https://www.youtube.com/watch?v=b6kYqOEyfbC>

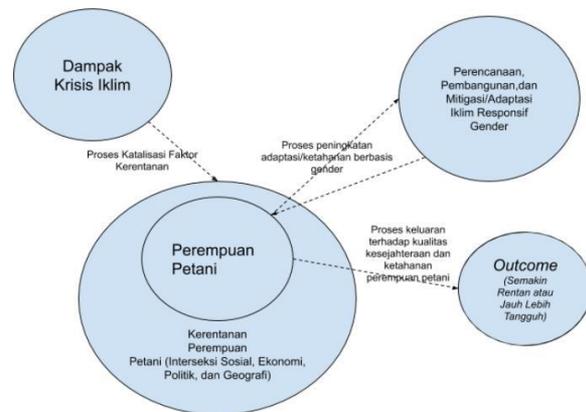
sekolah dasar.

Bila didasarkan dari profil dan video wawancara surati mempunyai tingkat kerjasama dan deliberasi cukup baik dengan laki-laki atau pasangannya sebelum dan sesudah status sosial perwakinannya yaitu janda (terhitung saat peneliti bertemu pada diskusi virtual oleh KLH) karena suaminya telah meninggal. Surati juga memegang peranan sosial masyarakat sebagai ketua kelompok wanita tani yang ada di desanya dan membina banyak petani baik perempuan maupun laki-laki. Tidak hanya itu Surati terlihat vokal dengan memimpin pertemuan dan pelatihan antar kelompok petani baik di dalam maupun di luar Wonogiri. Posisi sebagai pemulih benih padi juga menguatkan kapasitas pengetahuan dari Surati sebagai perempuan petani. Hal ini ia dapatkan dari proses pembangunan kapasitas yang diterima olehnya.

Untuk menjelaskan signifikansi pembangunan yang responsif gender, kerentanan perempuan petani, dan dampak krisis iklim, peneliti mengilustrasikannya kedalam pola sederhana (gambar 1.3) bagaimana sub-sub bagian pada aspek di atas berinteraksi menghasilkan keluaran yang cukup tergantung dengan masukan dan interseksi faktor kerentana yang ada.

Sebagai sebuah komparasi, peneliti menilai dari sudut pandang kerentanan

dengan menggunakan temuan bahwa perempuan petani begitu pasif —minim



*dan Krisis Iklim Terhadap Kerentanan Perempuan Petani Hasil Penelitian*

memiliki akses sumber daya pengetahuan yang cukup untuk mengelola pertaniannya, tidak memiliki cukup posisi tawar dalam norma masyarakat (terutama kaitannya dengan peran politik, bio-fisik, dan keputusan finansial keluarga). Menunjukkan indikasi kuat semakin lemahnya kualitas keluaran kesejahteraan dan ketahanan perempuan petani akibat hasil dari paparan dampak krisis iklim maupun proses perencanaan, pembangunan, dan adaptasi/mitigasi krisis iklim. Hal ini semakin memperkuat realitas dimana krisis iklim mempunyai kekuatan dalam katalisasi kerentanan yang sudah muncul di sekeliling perempuan petani (Goodrich et al., 2019; Osborne, 2015; Rao, Lawson, Raditloaneng, Solomon, & Angula, 2019).

Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari peran gender seperti penguasaan teknologi, pengambilan keputusan, serta

penghasilan selama krisis iklim tidak didapatkan oleh perempuan, tentu menghasilkan *outcome* yang kurang pro terhadap kebutuhan perempuan yang berbeda-beda seperti: kebutuhan personal perempuan; penurunan kualitas kesehatan yang dapat berkurang secara gradual akibat beban ganda dan keadaan ekonomi; dan hak-hak aset dan akses terhadap tanah dan fasilitas publik yang berkurang yang tidak responsif gender seperti pada pendaftaran dan kepemilikan kartu tani yang hanya dimiliki oleh kepala keluarga saja, sehingga pengakuan profesi perempuan petani secara formal tidak terjamin dan diakui kecuali sudah berstatus kepala keluarga (janda) (Abbasi, Anwar, Habib, Khan, & Waqar, 2019; Kushandajani & Alfirdaus, 2019; Mamaril & Lu, 2019)

Oleh karena itu kerentanan perempuan petani akibat krisis iklim dengan melihat desa studi kasus begitu terlihat, dirasakan, namun tidak cukup dimengerti dampaknya oleh perempuan petani. Dengan berbicara mengenai bagaimana *input* (akses, kontrol, dan partisipasi) untuk perempuan petani yang melemah di segala sektor pertanian khususnya didorong dengan tidak adanya pembangunan yang responsif gender baik secara mikro, meso, dan makro di desa studi kasus.

Selain itu, *output* berupa *outcome* (manfaat) dari perempuan petani juga cenderung tidak setara, utamanya dengan

bagaimana beban ganda, bahan *triple burden* perempuan petani hadir saat terjadi krisis iklim. tarikan ini hadir pada segenap interseksi ekonomi, politik, sosial, dan bahkan psikologis masing-masing perempuan petani (Arora-Jonsson, 2011; Ylipaa et al., 2019).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Mengambil setting masyarakat petani di Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang, kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian ini, peneliti telah menguji bagaimana kerentanan gender pada perempuan petani di Kabupaten Karanganyar hadir dan diperburuk dengan adanya dampak krisis iklim. Perempuan petani sebelumnya telah mengalami banyak bukti kerentanan baik secara ekonomi, sosial, maupun kondisi politik utamanya diakibatkan oleh konstruksi sosial secara mikro, meso, dan makro. Kerentanan gender pada perempuan petani membicarakan konteks beban berlipat yang harus ditanggung oleh perempuan petani di akibatkan kondisi perekonomian yang murni bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan.

Bagaimanapun, peneliti melihat kapasitas masing-masing perempuan sangat bervariasi dan berbeda utamanya mengenai kapasitas ketahanan untuk menghadapi dampak krisis iklim, kondisi intersksi tersebut diantaranya secara peran sosial dan

masyarakat (mengindikasikan kelompok umur dan kelas), kepemilikan aset/harta (mengindikasikan kelas), jenis pekerjaan (mengindikasikan kelas) , dan pekerjaan alternatif (mengindikasikan kelas) dimana menghasilkan beberapa orang terpapar lebih tinggi daripada yang lainnya (*differentiated Vulnerabilities*) secara berkelanjutan. Proses terdampak perempuan petani dengan krisis iklim semakin diperjelas dengan iklim maskulinitas dimana perempuan petani tidak mempunyai *input* (akses, kontrol, dan partisipasi) yang proporsional untuk di segala sektor pertanian khususnya didorong dengan tidak adanya pembangunan yang responsif gender. Hal ini berpengaruh dengan *outcome* (manfaat) dari perempuan petani juga cenderung tidak proporsional pula dengan laki-laki, utamanya dengan bagaimana beban ganda, bahan *triple burden* perempuan petani hadir saat terjadi krisis iklim. tarikan ini hadir pada segenap interseksi ekonomi, politik, sosial, dan bahkan psikologis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, S. S., Anwar, M. Z., Habib, N., Khan, Q., & Waqar, K. (2019). Identifying gender vulnerabilities in context of climate change in Indus basin. *Environmental Development*, 31(November), 34–42. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2018.12.005>
- Arora-Jonsson, S. (2011). Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change. *Global Environmental Change*, 21(2), 744–751. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.01.005>
- Carr, E. R. (2008). Between structure and agency: Livelihoods and adaptation in Ghana's Central Region. *Global Environmental Change*, 18(4), 689–699. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.06.004>
- Carr, E. R., & Thompson, M. C. (2014). Gender and Climate Change Adaptation in Agrarian Settings: Current Thinking, New Directions, and Research Frontiers. *Geography Compass*, 8(3), 182–197. <https://doi.org/10.1111/gec3.12121>
- Denton, F. (2002). Climate change vulnerability, impacts, and adaptation: Why does gender matter? *Gender and Development*, 10(2), 10–20. <https://doi.org/10.1080/13552070215903>
- Eastin, J. (2018). Climate change and gender equality in developing states. *World Development*, 107, 289–305. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.021>
- Goodrich, C. G., Udas, P. B., & Larrington-Spencer, H. (2019). Conceptualizing gendered vulnerability to climate change in the Hindu Kush Himalaya: Contextual conditions and drivers of change. *Environmental Development*, 31(November), 9–18. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2018.11.003>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa). (2019). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019*.
- Kushandajani, & Alfirdaus, L. K. (2019). Women's Empowerment in Village Governance Transformation in Indonesia: Between Hope and Criticism. *International Journal of Rural Management*, 15(1), 137–157.

- <https://doi.org/10.1177/0973005219836576>
- MacGregor, S. (2010). "Gender and climate change": From impacts to discourses. *Journal of the Indian Ocean Region*, 6(2), 223–238. <https://doi.org/10.1080/19480881.2010.536669>
- Mamaril, M., & Lu, J. L. (2019). Roll up your sleeves: Why is it important to highlight gender in agriculture? *Journal of International Women's Studies*, 20(3), 139–153.
- Osborne, N. (2015). Intersectionality and kyriarchy: A framework for approaching power and social justice in planning and climate change adaptation. *Planning Theory*, 14(2), 130–151. <https://doi.org/10.1177/1473095213516443>
- Partey, S. T., Dakorah, A. D., Zougmore, R. B., Ouédraogo, M., Nyasimi, M., Nikoi, G. K., & Huyer, S. (2020). Gender and climate risk management: evidence of climate information use in Ghana. *Climatic Change*, 158(1), 61–75. <https://doi.org/10.1007/s10584-018-2239-6>
- Rao, N., Lawson, E. T., Raditloaneng, W. N., Solomon, D., & Angula, M. N. (2019). Gendered vulnerabilities to climate change: insights from the semi-arid regions of Africa and Asia. *Climate and Development*, 11(1), 14–26. <https://doi.org/10.1080/17565529.2017.1372266>
- Rochmayanto, Y., & Kurniasih, P. (2013). Peranan gender Dalam Adaptasi Perubahan Iklim Pada Ekosistem Pegunungan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat ( The Role of Gender on Climate Change Adaptation in the Mountainous Ecosystem at Solok District , West Sumatera ). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(3), 203–213.
- Ylipaa, J., Gabrielsson, S., & Jerneck, A. (2019). Climate change adaptation and gender inequality: Insights from Rural Vietnam. *Sustainability (Switzerland)*, 11(10), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su11102805>